



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404 Kode Pos: 60236
website: bkd.jatimprov.go.id email: bkd@jatimprov.go.id

SURABAYA

Surabaya, 12 Oktober 2022

Nomor : 892.1/7038/204.2/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 4 (empat) halaman
Perihal : Penyerahan Dokumen
Kepegawaian untuk IPDN
Angkatan XXVIII dan XXIX

Kepada:
Yth. Kepala BKD/BKPSDM/BKPSDA/BKPPD
Kabupaten/Kota se-Jawa Timur
di-
T E M P A T

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Purna Praja IPDN Angkatan XXVIII sejumlah **81 (delapan puluh satu) orang** dan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri Purna Praja IPDN Angkatan XXIX sejumlah **101 (seratus satu) orang** (daftar terlampir) yang penempatannya di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Selanjutnya disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat dokumen kepegawaian yang telah diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu:
 - a. SK Pegawai Negeri Sipil (PNS), Surat Keputusan Mutasi dan Surat Tanda Tamat Pelatihan pada Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS untuk Purna Praja IPDN Angkatan XXVIII; dan
 - b. SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan SPMT untuk Purna Praja IPDN Angkatan XXIX.
2. Penyerahan dokumen kepegawaian pada poin 1 dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 13 Oktober 2022**

Waktu : Pukul 09.00 s.d 15.00 WIB

Tempat : Bidang P3DaSI, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur
Lantai 2, Gedung C Disperindag Provinsi Jawa Timur
Jalan Jemur Andayani I Surabaya

Keterangan : BKD/BKPSDM/BKPSDA/BKPPD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur menugaskan pejabat yang membidangi untuk mengambil dokumen kepegawaian dimaksud
3. Terhitung mulai Bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 untuk penggajian Purna Praja IPDN Angkatan XXVIII masih menjadi beban Kementerian Dalam Negeri, selanjutnya penggajian terhitung 1 Januari 2023 dibebankan pada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dokumen Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) akan diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada bulan Desember tahun 2022;

4. Penempatan Purna Praja IPDN Angkatan XXVIII untuk setiap Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur **sejumlah 2 (dua) orang** dan Pemerintah Provinsi **sejumlah 5 (lima) orang**, sedangkan Purna Praja IPDN Angkatan XXVIII yang tidak mendapatkan dokumen kepegawaian tersebut berarti **ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri** untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat menyesuaikan dan berkoordinasi langsung Biro Kepegawaian Kemendagri perihal penempatan;
5. Purna Praja IPDN Angkatan XXVIII setelah diserahkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada tanggal 13 Oktober 2022 untuk segera melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan yang diampu;
6. Pelaksanaan pengambilan sumpah janji PNS untuk Purna Praja IPDN Angkatan XXVIII dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670409 199202 2 003

**DAFTAR PENEMPATAN ORIENTASI TUGAS
PURNA PRAJA IPDN ANGKATAN XXIX**

NO	NAMA LENGKAP	L/P	PRODI	PENEMPATAN ORIENTASI TUGAS
1	A. BRILLIANT LUTFIA ISTIQOMAH	P	KEUANGAN PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
2	A. MUSTA'IN MAULIDUSSYUKRON	L	POLITIK INDONESIA TERAPAN	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
3	ADELIA AMANDA	P	MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
4	AYU MAGHFIRAH SARI ALAMSYAH	P	MANAJEMEN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
5	BAYU SUKMA WIRAGA	L	PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
6	BHISMA WIFHANDA ALDIANSYAH	L	PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
7	BRAJA MANASTHA WINDUAJI	L	POLITIK INDONESIA TERAPAN	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
8	CANTIKA KUSUMA SEPTIANI	P	STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
9	DAYU PRASTYO	L	KEUANGAN PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
10	DWI BAYU TAUFIQUR RAHMAN	L	MANAJEMEN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
11	DZIKRI FADLILLAH	L	PRAKTIK PERPOLISIAN TATA PAMONG	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
12	DZIKRULLAH SUWARDI	L	STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
13	EKA SAPTA SURYA MAULANA	L	PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
14	FAJAR RISZY JAMALLUDIN WICAKSONO	L	MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
15	FARIDA ADAWIYAH SISWANDINI	P	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
16	FIRHAN MAHDAVIKIA	L	STUDI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
17	MAYANG PUTRI PANGESTI	P	PRAKTIK PERPOLISIAN TATA PAMONG	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
18	MELLIYANA DWI FEBRIYANTI	P	STUDI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
19	NISFI ANUGERAH RAMADHANI	L	STUDI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
20	PUSPA AYU WIDHI PANGESTU	P	MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
21	R. YOFAN AFRYNAREL MILLENDIKA PUTRA	L	MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
22	RAFIF FARIZTIANANDA	L	TEKNOLOGI REKAYASA INFORMASI PEMERINTAHAN	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
23	SOVIYAH RAKHMADIYANTY	P	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
24	TRIANING MUSTIKAWATI	P	STUDI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
25	DIMAS RAHMATULLAH	L	STUDI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KOTA SURABAYA
26	FIRDA AFRA HABIBA SALSABILA	P	MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	KOTA SURABAYA
27	DIMAS PRAYOGI	L	TEKNOLOGI REKAYASA INFORMASI PEMERINTAHAN	KOTA PROBOLINGGO
28	RIKA AYU MAGHFIROH	P	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	KOTA PROBOLINGGO
29	AKDIM HERU SAPUTRA	L	TEKNOLOGI REKAYASA INFORMASI PEMERINTAHAN	KOTA PASURUAN
30	VIANDHIKA PRANASTA	L	MANAJEMEN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PUBLIK	KOTA PASURUAN

NO	NAMA LENGKAP	L/P	PRODI	PENEMPATAN ORIENTASI TUGAS
31	RIYANDA PRATAMA	L	STUDI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KOTA MOJOKERTO
32	WAFAA' NANDA SEPTIAN WIDARMANTO	L	MANAJEMEN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PUBLIK	KOTA MOJOKERTO
33	EDO DJATI SANTOSO	L	POLITIK INDONESIA TERAPAN	KOTA MALANG
34	FRANTARA ANDIAN PRANATA	L	MANAJEMEN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PUBLIK	KOTA MALANG
35	KATON NURAHARTO	L	POLITIK INDONESIA TERAPAN	KOTA MADIUN
36	KHRISNA WAHYU PRATAMA	L	TEKNOLOGI REKAYASA INFORMASI PEMERINTAHAN	KOTA MADIUN
37	GALENA 'ILMA BAHARA LIVA PERSAJA	P	MANAJEMEN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PUBLIK	KOTA KEDIRI
38	MUHAMMAD HILMY	L	MANAJEMEN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PUBLIK	KOTA KEDIRI
39	MAYA DIELLA	P	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	KOTA BLITAR
40	TITIES REGATA AJI MAHENDRA	L	TEKNOLOGI REKAYASA INFORMASI PEMERINTAHAN	KOTA BLITAR
41	FAVIAN YAFI' NAUFAL	L	MANAJEMEN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PUBLIK	KOTA BATU
42	NUR MALA SARI	P	POLITIK INDONESIA TERAPAN	KOTA BATU
43	ARDINATUL SISMONICA	P	PRAKTIK PERPOLISIAN TATA PAMONG	KABUPATEN TULUNGAGUNG
44	KHARINA NUGRAHAYU LESTARI	P	MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	KABUPATEN TULUNGAGUNG
45	MUHAMMAD SYARIFI QOLBI	L	TEKNOLOGI REKAYASA INFORMASI PEMERINTAHAN	KABUPATEN TULUNGAGUNG
46	FIRDAUS SURYA RAHMAWATI	P	PRAKTIK PERPOLISIAN TATA PAMONG	KABUPATEN TUBAN
47	SEPTIAN DWI REFORMANSYAH	L	KEUANGAN PUBLIK	KABUPATEN TUBAN
48	FAISHAL RAUF RAMADHANI	L	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	KABUPATEN TRENGGALEK
49	OSCHAR ALFAN DHAMARA WINTA	L	PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KABUPATEN TRENGGALEK
50	PINGKY CHANDRA TYAS WILUTAMI	P	MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	KABUPATEN SUMENEP
51	KAUTSAR ZULFAHMI	L	TEKNOLOGI REKAYASA INFORMASI PEMERINTAHAN	KABUPATEN SITUBONDO
52	RIZAL BAHRONI	L	STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	KABUPATEN SITUBONDO
53	ARUM HAYUNING PANGESTUTI	P	STUDI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KABUPATEN SIDOARJO
54	MUHAMMAD TAUFIQ	L	KEUANGAN PUBLIK	KABUPATEN SIDOARJO
55	YUMAS NORMA DEWANTI	P	STUDI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KABUPATEN SIDOARJO
56	DANI HANDIKA SIMATUPANG	L	KEUANGAN PUBLIK	KABUPATEN SAMPANG
57	MUHAMMAD RAFDIANSYAH	L	STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	KABUPATEN SAMPANG
58	ALPIANSYAH	L	TEKNOLOGI REKAYASA INFORMASI PEMERINTAHAN	KABUPATEN PROBOLINGGO
59	MUHAMMAD IQBAL MAULANA	L	PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KABUPATEN PROBOLINGGO
60	BANGUN KRISMU PARIKESIT	L	PRAKTIK PERPOLISIAN TATA PAMONG	KABUPATEN PONOROGO
61	MUHAMMAD DENI TOPAN FEBRIAN	L	STUDI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KABUPATEN PONOROGO
62	ACHMAD WAHYU ISNAIN	L	MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	KABUPATEN PASURUAN

NO	NAMA LENGKAP	L/P	PRODI	PENEMPATAN ORIENTASI TUGAS
63	FADHLIN SAZUFI	L	TEKNOLOGI REKAYASA INFORMASI PEMERINTAHAN	KABUPATEN PASURUAN
64	DHESYA FAHIRA RIADY	P	KEUANGAN PUBLIK	KABUPATEN PAMEKASAN
65	NANDA ALDI ARROHIM	L	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	KABUPATEN PAMEKASAN
66	ACHMAD GUSTIAN	L	POLITIK INDONESIA TERAPAN	KABUPATEN PACITAN
67	GADIS AGISKA	P	STUDI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KABUPATEN NGAWI
68	NURRI WIDIANTI PUTRI	P	PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KABUPATEN NGAWI
69	ARI SAMUDRO PRIBADI	L	STUDI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KABUPATEN NGANJUK
70	NIZAR FREDIKA ARDHIANSAH	L	MANAJEMEN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PUBLIK	KABUPATEN NGANJUK
71	PRATAMA KING GEA	L	PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KABUPATEN MOJOKERTO
72	YUNI HASFI HANIK	P	POLITIK INDONESIA TERAPAN	KABUPATEN MOJOKERTO
73	HELISDA SYAFITRI	P	POLITIK INDONESIA TERAPAN	KABUPATEN MALANG
74	HUSNI ANSHARI	L	POLITIK INDONESIA TERAPAN	KABUPATEN MALANG
75	BAGAS SAKTIADJI ESAMANDA	L	MANAJEMEN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PUBLIK	KABUPATEN MAGETAN
76	DAFFA SYADDAD FELIX RAHARJO PUTRA	L	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	KABUPATEN MAGETAN
77	LION LUTHFI BERLIANSYAH	L	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	KABUPATEN MADIUN
78	MILENIA RIZKY DARMAANTI	P	MANAJEMEN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PUBLIK	KABUPATEN MADIUN
79	FARRAS ARETHA NOFSY	L	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	KABUPATEN LUMAJANG
80	IZZA MAULINA	P	KEUANGAN PUBLIK	KABUPATEN LUMAJANG
81	MARCELINE PUTRI CHRISDIANTI	P	KEUANGAN PUBLIK	KABUPATEN LAMONGAN
82	MUHAMMAD ROSUL PANGESTU	L	POLITIK INDONESIA TERAPAN	KABUPATEN LAMONGAN
83	REFINDA CHRIS SHERAFI	P	TEKNOLOGI REKAYASA INFORMASI PEMERINTAHAN	KABUPATEN KEDIRI
84	SYAHRUL KUSUMA PRADANA	L	KEUANGAN PUBLIK	KABUPATEN KEDIRI
85	CAMELIA RIZKI HANA	P	STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	KABUPATEN JOMBANG
86	REVIAN SANDY LAKSANA	L	MANAJEMEN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PUBLIK	KABUPATEN JOMBANG
87	MOCHAMMAD ZHAFRAN RIZKY HERNANTO	L	PRAKTIK PERPOLISIAN TATA PAMONG	KABUPATEN JEMBER
88	NANDA NUZUL ROMADHON	L	PRAKTIK PERPOLISIAN TATA PAMONG	KABUPATEN JEMBER
89	AHMAD MUHAMMAD	L	KEUANGAN PUBLIK	KABUPATEN GRESIK
90	MUHAMMAD SHOBIRUR RIZQI	L	MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK	KABUPATEN GRESIK
91	AMELIA WULANDARI	P	TEKNOLOGI REKAYASA INFORMASI PEMERINTAHAN	KABUPATEN BONDOWOSO
92	YOSUA DWIANDARUADI	L	PRAKTIK PERPOLISIAN TATA PAMONG	KABUPATEN BONDOWOSO
93	GALUH PRIMADHAYANTI	P	STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	KABUPATEN BOJONEGORO
94	MOCH. ALI FAHMI	L	KEUANGAN PUBLIK	KABUPATEN BOJONEGORO

NO	NAMA LENGKAP	L/P	PRODI	PENEMPATAN ORIENTASI TUGAS
95	UBAID IS NUR ROSYID PRASETIYO	L	TEKNOLOGI REKAYASA INFORMASI PEMERINTAHAN	KABUPATEN BOJONEGORO
96	NABILA ROHADAYATULAI SY ERAGANDHI	P	STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	KABUPATEN BLITAR
97	ROY ANGGA WARSITO	L	POLITIK INDONESIA TERAPAN	KABUPATEN BLITAR
98	IDZHAR NURCAHYO	L	STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	KABUPATEN BANYUWANGI
99	PRAYOGI WICAKSONO	L	POLITIK INDONESIA TERAPAN	KABUPATEN BANYUWANGI
100	IQOMATUL FITRIYAH	P	PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KABUPATEN BANGKALAN
101	RIZKI NOVRIANSYAH	L	STUDI KEBIJAKAN PUBLIK	KABUPATEN BANGKALAN